



# RENJA PERUBAHAN 2022

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BANYUMAS

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Perubahan 2022. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup

perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Perubahan 2022, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

**” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas yaitu:

1. **Misi ke-1** : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat dan tujuan ke 1 yaitu Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta sasaran ke Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran ke 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. **Misi ke-2** : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok Pada tujuan ke 3 yaitu Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dan sasaran ke 7 yaitu Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan indikator sasaran Persentase penurunan penduduk miskin.
3. **Misi ke-8** : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious dan Tujuan ke 9 yaitu Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat serta sasaran ke 21 yaitu Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara dengan indikator sasaran Persentase penurunan konflik sosial.

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Perubahan 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak- Grobogan, Kawasan Purworejo- Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal,Pemalang;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
18. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan stunting;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
32. Peraturan Bupati Banyumas No.94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Perubahan 2022 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah Perubahan 2022 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinsospermasdes Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah Perubahan 2022.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Perubahan 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas selama Perubahan 2022.

#### I.4. SISTEMATIKA

**BAB I PENDAHULUAN**, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**, menguraikan Rencana Kerja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

**BAB V PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

### **II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas selama tahun 2021 dan perkiraan target Perubahan 2022. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

**A. *Penetapan Indikator Kinerja***

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

## **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **Evaluasi Program Tahun 2021**

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Dinsospermasdes tahun 2021 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2021 sebesar Rp 16.874.685.282.-,- Penyerapan anggaran Dinospermasdes Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 15.508.992.970,- ( 91 % )

Dinsospermades Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 10 program, 19 Kegiatan dan 66 Sub Kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**DINSOSPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	3Kegiatan monitoring jj		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</b>	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100%	100	0	0
<b>Meningkatnya penanganan sosial</b>	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik		100	100	100	100	100%	100	0	0
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi		100	100	100	100	100%	100	0	0
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhabilitasi		100	100	100	100	100%	100	0	0
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	100	100	100	100%	100	0	0
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai		100	100	100	100	100%	100	0	0
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100%	100	0	0
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100	100	100	100	100%	100	0	0
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun		4	4	4	4	100%	4	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	3	3	3	3	100%	3	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	1	2	1	2	100%	1	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	2	2	2	2	100%	2	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	46	46	46	46	100%	46	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	15	15	15	15	100%	15	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	6	6	6	6	100%	6	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	15	7	7	7	100%	10	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5	5	5	5	100%	5	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	15	8	8	8	100%	12	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	12	12	12	12	100%	12	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	150	100	100	100	100%	125	0	0
	Jumlah penggandaan yang tersedia	100000	66666	66666	66666	100%	83333	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	400	500	500	500	100%	400	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	3	3	3	3	100%	3	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	4	6	6	6	100%	6	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	15	10	10	10	100%	13	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	6	5	5	5	100%	5	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	2	2	2	2	100%	2	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	12	12	12	12	100%	12	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	47	47	47	47	100%	47	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	4	4	4	4	100%	4	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	30	30	30	30	100%	30	0	0
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	10	9	9	9	100%	10	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	20	15	15	15	100%	20	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	6	6	6	6	100%	6	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif	40	60	30	60	100%	39	0	0
	Jumlah pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) yang dilaksanakan	1	1	1	1	100%	1	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah komunitas adat terpencil yang mendapat pemberdayaan sosial	1	1	1	1	100%	1	0	0
<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga yang mendapat ijin pengumpulan sumbangan	2	2	2	2	100%	2	0	0
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>	Jumlah dunia usaha/lembaga yang terfasilitasi Penerbitan Ijinnya	2	9	1	9	100%	2	0	0
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah PSKS yang mendapat pengembangan potensi	7	7	7	7	100%	7	0	0
<b>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah TKSK yang mendapat pembinaan	27	27	27	27	100%	27	0	0
<b>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan	10	5	5	5	100%	5	0	0
<b>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah LKS/PSKS yang mendapat pembinaan	4	4	4	4	100%	4	0	0
<b>Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</b>	Jumlah petugas dan pendamping sosial mendapat pembinaan	10	10	10	10	100%	10	0	0
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100%	100	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jenis PPKS yang tertangani sesuai SPM	5	5	5	5	100%	5	0	0
Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	270	331	331	331	100%	300	0	0
Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan sandang	100	100	100	100	100%	100	0	0
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar menerima bantuan alat bantu	27	27	27	27	100%	27	0	0
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS terlantar mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	3	64	3	64	100%	3	0	0
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS terlantar yang menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	7	257	5	257	100%	6	0	0
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PPKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	6	30	6	30	100%	6	0	0
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS terlantar yang menerima Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6	20	6	20	100%	6	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Pemberian Layanan Rujukan</b>	Jumlah PPKS terlantar yang menerima layanan rujukan	6	10	6	10	100%	6	0	0
<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Jenis PPKS Yang tertangani diluar SPM	20	4	20	4		20	0	0
<b>Penyediaan Permakanan</b>	Jumlah PPKS bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar panti yang menerima bantuan permakanan	200	150	150	150	100%	200	0	0
<b>Penyediaan Alat Bantu</b>	Jumlah penyandang disabilitas bukan korban HIV / AIDS dan Napza di luar panti yang menerima bantuan alat bantu	30	27	27	27	100%	27	0	0
<b>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</b>	Jumlah PPKS Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan Napza di luar yang menerima pembinaan	6	15	6	15	100%	6	0	0
<b>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA</b>	Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar yang mendapatkan bimbingan sosial	6	6	6	6	100%	6	0	0
	Jumlah PPKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	20	10	10	10	100%	6	0	0
<b>Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>	Jumlah PPKS lainnya yang menerima fasilitasi Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10	15	10	15	100%	6	0	0



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
<b>Pemberian Layanan Rujukan</b>	Jumlah PPKS lainnya yang menerima layanan rujukan	10	18	10	18	100%	6	0	0	
<b>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	2	2	2	2	100%	2	0	0	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional	1	1	1	1	100%	1	0	0	
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	1	1	1	1	100%	1	0	0	
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapat perbaikan dan perawatan	1	1	1	1	100%	1	0	0	
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang menerima perlindungan Sosial	100	100	100	100	100%	100	0	0	
<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan pemeliharaan	10	3	3	3	100%	5	0	0	
<b>Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar</b>	Jumlah anak terlantar yang dipantau	10	3	3	3	100%	5	0	0	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah fakir miskin yang didata	150000	400000	150000	400000	100%	150000	0	0	
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah fakir miskin yang mendapat fasilitasi pendataan	150000	400000	150000	400000	100%	150000	0	0	
<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial	%	10	688	916	688	75,11%	900	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jumlah pendamping PKH yang difasilitasi	300	292	300	292	97,32%	300	0	0
	Jumlah fakir miskin penerima bantuan pengembangan ekonomi yang difasilitasi	35	0	0	0	0	30	0	0
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	100	100	100	100	100%	100	0	0
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	100	180	100	180	100%	100	0	0
<b>Penyediaan Makanan</b>	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan makanan	70	180	75	180	100%	70	0	0
<b>Penyediaan Sandang</b>	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang	70	75	75	75	100%	70	0	0
<b>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</b>	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan evakuasi	10	10	10	10	100%	10	0	0
	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan psikososial	15	180	8	180	100%	10	0	0
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan dan pencegahan bencana	1	1	1	1	100%	1	0	0
	Jumlah kampung siaga bencana yang dibina	35	4	23	4	17,39%	30	0	0
<b>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</b>	Jumlah Taruna siaga bencana yang dibina	15	6	6	6	100%	10	0	0
<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan</b>	Indeks Desa Membangun	%	0,694	0,7033	0,681	0,7033	100%	0,688	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	Persentase desa yang meningkat statusnya	80	60,47	60	60,47	100%	70	0	0
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Persentase peningkatan status desa mandiri	40	30	30	30	100%	30	0	0
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah desa yang mendapat penataan desa	50	58	50	58	100%	50	0	0
	Jumlah desa yang difasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5	5	5	5	100%	5	0	0
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi sarana prasarana desa	12	8	8	8	100%	10	0	0
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	2	4,3	2	4,3	100%	2	0	0
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi	5	3	5	3		5	0	0
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	3	3	2	3	100%	3	0	0
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan Yang di Fasilitasi	1	1	1	1	100%	1	0	0
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan administrasi baik	40	30	30	30	100%	30	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	101	108	100	108	100%	100	0	0
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan desa	301	301	301	301	100%	301	0	0
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan keuangan desa	301	301	301	301	100%	301	0	0
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	100	50	50	50	100%	100	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa</b>	Jumlah Bumdes dan lembaga kerjasama anatar desa yang mendapat pembinaan	12	84	5	84	100%	10	0	0
<b>Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</b>	Jumlah desa yang mengadakan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	5	27	27	27	100%	5	0	0
<b>Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</b>	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	15	5	5	5	100%	10	0	0
<b>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</b>	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	7	1	7	1		7	0	0
<b>Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</b>	Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa	30	8	5	8	100%	10	0	0
<b>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD</b>	Jumlah desa yang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nya mendapat pembinaan	10	5	5	5	100%	7	0	0
<b>Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa</b>	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batasnya	3	3	3	3	100%	3	0	0
<b>Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa</b>	Jumlah desa yang mendapat pembinaan penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Desa	15	72	5	72	100%	10	0	0
	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan)	3	3	3	3	100%	3	0	0
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100	100	100	100	100%	100	0	0
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan</b>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	6	2	6	2		6	0	0

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>									
<b>Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat</b>	Jumlah masyarakat hukum adat yang di inventarisir	5	5	5	5	100%	5	0	0
<b>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</b>	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan	6	20	6	20	100%	6	0	0
<b>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</b>	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina	20	20	20	20	100%	20		
<b>Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</b>	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	%	26	7	26	100%	7		
		7							

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Perubahan 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</b>	Jumlah lembaga usaha ekonomi masyarakat desa yang dibina (BUMDES dan Pasar Desa)	5	9	5	9	100%	5	0	0
	Jumlah fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	12	12	12	12	100%	12	0	0

## **II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas No.94 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah;

Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumasterdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1)Sub Bagian Keuangan:
  - 2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Kor Perencanaan
3. Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial (PJRS), terdiri dari :
  - 1) Sub Kor Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - 2) Sub Kor Rehabilitasi Sosial
4. Bidang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM), terdiri dari :
  - 1) Sub Kor Pemberdayaan Sosial
  - 2) Sub Kor. Penanganan Fakir Miskin

5. Bidang Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (PESDATTG) terdiri dari :
  - 1) Sub Kor .Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
  - 2) Sub Kor.Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Permas) terdiri dari :
  - 1) Sub Kor.Perencanaan Partisipatif Pembangunan dan Kawasan Pedesaan
  - 2) Sub Kor Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa
  - 3) Sub Kor. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa
7. Bidang Bidang Bina Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - 1) Sub Kor. Pembinaan Aparatur dan Otonomi Desa;
  - 2) Sub. Kor. Administrasi Pemerintahan Desa; dan
  - 3) Sub Kor. Pengelolaan Aset Desa.
8. UPTD
9. Kelompok Jabatan Fungsional

**Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp 18.771.401.029,- terurai dalam 10 program, 19 kegiatan dan 66 Sub Kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.



Tabel T-C.30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Cata- tan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022 (s/d Tw2)	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik			100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi			100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi			100	100	100	100	100	100	100	
5	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	V		100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	v		100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun			4	4	4	4	0	4	4	
11	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun			3	3	3	3	1	3	3	
12	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun			1	1	1	2	0	1	1	
13	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola			2	2	2	2	2	2	2	

14	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya			46	46	46	46	46	46	46	
15	Jumlah pengelola keuangan SKPD			15	15	15	15	15	15	15	0
16	Jumlah administrasi umum yang dikelola			6	6	6	6	6	6	6	0
17	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia			7	10	15	7	0	10	15	0
18	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			5	5	5	5	0	5	5	0
19	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia			8	12	15	8	0	12	15	0
20	Jumlah logistik kantor yang tersedia			12	12	12	12	3	12	12	0
21	Jumlah cetakan yang tersedia			100	125	150	100	20	125	150	0
22	Jumlah penggandaan yang tersedia			6666 6	8333 3	100 000	66666	2000 0	8333 3	1000 00	0
23	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan			500	400	400	500	100	400	400	0
24	Jumlah barang milik daerah yang tersedia			3	3	3	3	3	3	3	0
25	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia			6	6	4	6	2	6	4	
26	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia			10	13	15	10	0	13	15	
27	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia			5	5	6	5	0	5	6	
28	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia			2	2	2	2	0	2	2	
29	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola			12	12	12	12	12	12	12	
30	Jumlah Pegawai Non ASN			47	47	47	47	47	47	47	
31	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan			4	4	4	4	4	4	4	
32	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara			30	30	30	30	10	30	30	
33	Jumlah mebelair yang dipelihara			9	10	10	9	4	10	10	

34	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara			15	20	20	15	5	20	20	
35	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara			6	6	6	6	2	6	6	
36	Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif			30	39	40	60	0	39	40	
37	Jumlah pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) yang dilaksanakan			1	1	1	1	0	1	1	
38	Jumlah komunitas adat terpencil yang mendapat pemberdayaan sosial			1	1	1	1	0	1	1	
39	Jumlah lembaga yang mendapat ijin pengumpulan sumbangan			2	2	2	2	0	2	2	
40	Jumlah dunia usaha/lembaga yang terfasilitasi Penerbitan Ijinnya			1	2	2	9	0	2	2	
41	Jumlah PSKS yang mendapat pengembangan potensi			7	7	7	7	2	7	7	
42	Jumlah TKS yang mendapat pembinaan			27	27	27	27	27	27	27	
43	Jumlah masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan			5	5	10	5	0	5	10	
44	Jumlah LKS/PSKS yang mendapat pembinaan			4	4	4	4	2	4	4	
45	Jumlah petugas dan pendamping sosial mendapat pembinaan			10	10	10	10	0	10	10	
46	Persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			100	100	100	100	100	100	100	
47	Jenis PPKS yang tertangani sesuai SPM			5	5	5	5	4	5	5	
48	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan			331	330	270	331	0	330	270	
49	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar			100	100	100	100	11	100	100	

	Panti Sosial yang menerima bantuan sandang										
50	Jumlah penyandang disabilitas terlantar menerima bantuan alat bantu			27	27	27	27	15	27	27	
51	Jumlah PPKS terlantar mendapat pelayanan reunifikasi keluarga			3	3	3	64	2	3	3	
52	Jumlah PPKS terlantar yang menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			5	6	7	257	3	6	7	
53	Jumlah PPKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			6	6	6	30	0	6	6	
54	Jumlah PPKS terlantar yang menerima Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			6	6	6	20	0	6	6	
55	Jumlah PPKS terlantar yang menerima layanan rujukan			6	6	6	10	0	6	6	
56	Jenis PPKS Yang tertangani diluar SPM			20	20	20	4	4	20	20	
57	Jumlah PPKS bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar panti yang menerima bantuan permakanan			150	200	200	150	0	200	200	
58	Jumlah penyandang disabilitas bukan korban HIV / AIDS dan Napza di luar panti yang menerima bantuan alat bantu			27	27	30	27	15	27	30	
59	Jumlah PPKS Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan Napza di luar yang menerima pembinaan			6	6	6	15	6	6	6	
60	Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar yang mendapatkan bimbingan social			6	6	6	6	0	6	6	
61	Jumlah PPKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,			10	6	20	10	0	6	20	

	Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak										
62	Jumlah PPKS lainnya yang menerima fasilitasi Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			10	6	10	15	0	6	10	
63	Jumlah PPKS lainnya yang menerima layanan rujukan			10	6	10	18	0	6	10	
64	Jumlah lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial			2	2	2	2	4	2	2	
65	Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional			1	1	1	1	1	1	1	
66	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara			1	1	1	1	1	1	1	
67	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapat perbaikan dan perawatan			1	1	1	1	1	1	1	
68	Persentase PPKS yang menerima perlindungan Sosial			100	100	100	100	100	100	100	
69	Jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan pemeliharaan			3	5	10	3	0	5	10	
70	Jumlah anak terlantar yang dipantau			3	5	10	3	3	5	10	
71	Jumlah fakir miskin yang didata			150000	150000	150000	400000	80302	150000	150000	
72	Jumlah fakir miskin yang mendapat fasilitasi pendataan			150000	150000	150000	400000	452	150000	150000	
73	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan social			916	900	875	688	0	900	875	
74	Jumlah pendamping PKH yang difasilitasi			300	300	300	292	0	300	300	
75	Jumlah fakir miskin penerima bantuan pengembangan ekonomi yang difasilitasi			0	30	35	0	0	30	35	
76	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat			100	100	100	100	100	100	100	
77	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social			100	100	100	180	0	100	100	
78	Jumlah korban bencana yang			75	70	70	180	70	70	70	

	menerima bantuan makanan										
79	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang			75	70	70	75	200	70	70	
80	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan evakuasi			10	10	10	10	274	10	10	
81	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan psikososial			8	10	15	180	10	10	15	
82	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan dan pencegahan bencana			1	1	1	1	0	1	1	
83	Jumlah kampung siaga bencana yang dibina			23	30	35	4	0	30	35	
84	Jumlah Taruna siaga bencana yang dibina			6	10	15	6	105	10	15	
85	Indeks Desa Membangun			0,68 1	0,68 8	0,6 94	0,703 3	0,716 3	0,688	0,69 4	
86	Persentase desa yang meningkat statusnya			60	70	80	60,47	6,64	70	80	
87	Persentase peningkatan status desa mandiri			30	30	40	30	3,32	30	40	
88	Jumlah desa yang mendapat penataan desa			50	50	50	58	0	50	50	
89	Jumlah desa yang difasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			5	5	5	5	0	5	5	
90	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi sarana prasarana desa			8	10	12	8	0	10	12	
91	Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa			2	2	2	4,3	0	2	2	
92	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi			5	5	5	3	0	5	5	
93	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi			2	3	3	3	0	3	3	
94	Jumlah Kawasan Perdesaan Yang di Fasilitasi			1	1	1	1	0	1	1	
95	Persentase desa dengan administrasi baik			30	30	40	30	30	30	40	
96	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan			100	100	101	108	50	100	101	
97	Jumlah desa yang mendapat pembinaan			301	301	301	301	50	301	301	

	administrasi pemerintahan desa										
98	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan keuangan desa			301	301	301	301	301	301	301	
99	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas			50	100	100	50	40	100	100	
100	Jumlah Bumdes dan lembaga kerjasama anatar desa yang mendapat pembinaan			5	10	12	84	37	10	12	
101	Jumlah desa yang mengadakan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa			27	5	5	27	3	5	5	
102	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa			5	10	15	5	3	10	15	
103	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)			7	7	7	1	10	7	7	
104	Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa			5	10	30	8	30	10	30	
105	Jumlah desa yang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nya mendapat pembinaan			5	7	10	5	3	7	10	
106	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batasnya			3	3	3	3	0	3	3	
107	Jumlah desa yang mendapat pembinaan penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Desa			5	10	15	72	5	10	15	
108	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan)			3	3	3	3	0	3	3	
109	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif			100	100	100	100	100	100	100	
110	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina			6	6	6	2	0	6	6	
111	Jumlah masyarakat hukum adat yang di inventarisir			5	5	5	5	0	5	5	

11 2	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan			6	6	6	20	0	6	6	
11 3	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina			20	20	20	20	0	20	20	
11 4	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat bantuan sarana dan prasarana			7	7	7	26	0	7	7	
11 5	Jumlah lembaga usaha ekonomi masyarakat desa yang dibina (BUMDES dan Pasar Desa)			5	5	5	9	0	5	5	
11 6	Jumlah fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna			12	12	12	12	1	12	12	



### A. II.3 ISU – ISU STRATEGIS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas menanggung 2 ( Dua ) Urusan Wajib yang Menjadi Tanggung jawabnya yaitu urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam 2 ( dua ) urusan tersebut terdapat beberapa isu isu strategis yaitu :

- Urusan Sosial
  - kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
  - penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang sebagian besar masih mengalami hambatan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri
  - Belum Maksimalnya operasional Rumah Singgah
  - Belum Maksimalnya kualitas SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) terkait dengan Mitra kerja dari pihak luar seperti karangtaruna
  - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS belum di mutakhirkan secara menyeluruh serta belum terintegrasi dengan data kependudukan
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Belum Terusunnya profil desa;
  - Belum Optimalnya Pembangunan Kawasan Pedesaan;
  - Belum Optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa;
  - Belum Optimalnya Identifikasi dan inventarisasi adat istiadat;
  - Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan serta peningkatan kapasitas dan penyediaan sarana prasarana kelembagaan desa/kelurahan (Posyandu, PKK, KPMD, BBGRM, KKN, Fasilitas banku, dll);
  - Belum Optimalnya Pengembangan usaha ekonomi desa untuk peningkatan PAD (OVOP);
  - Perlunya dan Fasilitas Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
  - Pelaksanaan Pilkada Perubahan 2022 pada 17 desa yang ada di Kabupaten Banyumas
  - Belum Optimalnya Inventarisasi Aset Desa
  - Belum Optimalnya Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa
  - Belum Optimalnya Tertib Administrasi Desa

## **B. LANGKAH – LANGKAH STRATEGIS**

Langkah – langkah Strategis yang diambil Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas yang tertuang Isu – Isu Strategis sebagai berikut :

1. Urusan Sosial
  - a. Melakukan pendataan dan pemetaan permasalahan social yang ada di masyarakat
  - b. Menyusun perencanaan partisipatif penanganan sesuai dengan SOP Penanganan Sosial
  - c. Koordinasi dan koordinasi lintas stakeholder yang terkait dengan permasalahan social yang ada di masyarakat
  - d. Membentuk pengorganisasian komunitas dan pelaksanaan kegiatan social
  - e. Melaksanakan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan kegiatan social
  - f. Menyelenggarakan edukasi dan fasilitasi kepada Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
  - g. Melakukan pendataan dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara periodic dan menyeluruh
  - h. Peningkatan kualitas SDM mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam kegiatan social yang ada di masyarakat
2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Bersinergi dengan Stakeholder terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa
  - b. Penyusunan kebijakan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
  - c. Melaksanakan sosialisasi terkait regulasi atau kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
  - d. Memfasilitasi permasalahan permasalahan yang ada di desa
  - e. Melakukan Pembinaan Tertib Administrasi Desa

## **C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Setelah isu strategis selanjutnya adalah langkah strategis yang akan diambil Dinsospermades Kabupaten Banyumas tetapi ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya Sumberdaya Manusia ( SDM ) yang berkualitas
2. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan penanganan PMKS dan edukasi serta fasilitasi SDM Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)
3. Sarana dan Prasarana yang memadai ( Akses internet pada desa )

4. Belum Sinergisnya kerjasama antar Kepala Desa dalam Kerjasama Antar Desa

Solusi dari beberapa hambatan diatas yaitu :

1. Dibutuhkan SDM yang berkualitas
2. Dipenuhinya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyandang Masalah Kesenjangan Sosial ( PMKS ) baik yang langsung maupun yang tidak langsung ( bersifat data yaitu DTKS )
3. Dipenuhinya Saprasi dalam yang mendukung kegiatan tersebut
4. Dibangunnya sinergitas kerjasama antar Kepala Desa dalam kerjasama antar desa.

#### **II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD Perubahan 2022 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah Perubahan 2022. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD Perubahan 2022 menunjukkan Bappedalitbang memiliki 4 program dan 17 kegiatan.

Tabel T-C.31  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023**  
**DINSOSPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS**  
**Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Perubahan 2022**  
**Kabupaten Banyumas**

Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Sumber Dana
			2022		2023		Target Akhir Renstra		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	13.593.785.540	100	13.497.457.000	100	39.687.320.556	PAD
Meningkatnya penanganan social	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100	126.408.000	100	87.715.000	100	366.304.650	PAD
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				126.408.000		87.715.000		366.304.650	PAD
	Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional		1	126.408.000	1	87.715.000	1	366.304.650	PAD
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				126.408.000		87.715.000		366.304.650	PAD
	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	Unit	1	126.408.000	1	87.715.000	1	366.304.650	PAD
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				126.408.000		87.715.000		366.304.650	PAD

	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapat perbaikan dan perawatan	Unit	1	126.408.000	1	87.715.000	1	366.304.650	PAD
Meningkatnya penanganan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	1.749.662.700	100	1.837.712.000	100	5.351.714.587	PAD
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				1.626.878.700		1.719.321.000		5.020.467.237	PAD
	Persentase PPKS yang menerima perlindungan Sosial	%	100	1.626.878.700	100	1.719.321.000	100	5.020.467.237	PAD
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				10.000.000		20.000.000		36.000.000	PAD
	Jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan pemeliharaan	Anak	5	10.000.000	10	20.000.000	18	36.000.000	PAD
Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				10.000.000		20.000.000		36.000.000	PAD
	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Anak	5	10.000.000	10	20.000.000	18	36.000.000	PAD
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.616.878.700		1.699.321.000		4.984.467.237	PAD
	Jumlah fakir miskin yang didata	Orang	150000	1.616.878.700	150000	1.699.321.000	150000	4.984.467.237	PAD
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				525.000.000		510.000.000		1.517.578.400	PAD
	Jumlah fakir miskin yang mendapat fasilitasi pendataan	Orang	150000	525.000.000	150000	510.000.000	150000	1.517.578.400	PAD

<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>				1.075.678.700		1.164.321.000		3.425.688.837	PAD
	<b>Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial</b>	<b>Orang</b>	900	1.045.678.700	875	1.134.321.000	2.691	3.335.688.837	PAD
	<b>Jumlah pendamping PKH yang difasilitasi</b>	<b>Orang</b>	300	30.000.000	300	30.000.000	300	90.000.000	PAD
<b>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>				16.200.000		25.000.000		41.200.000	PAD
	<b>Jumlah fakir miskin penerima bantuan pengembangan ekonomi yang difasilitasi</b>	<b>Orang</b>	30	16.200.000	35	25.000.000	65	41.200.000	PAD
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				122.784.000		118.391.000		331.247.350	PAD
	<b>Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat</b>	<b>%</b>	100	122.784.000	100	118.391.000	100	331.247.350	PAD
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				72.784.000		73.391.000		218.698.100	PAD
	<b>Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial</b>	<b>Orang</b>	100	72.784.000	100	73.391.000	300	218.698.100	PAD
<b>Penyediaan Makanan</b>				28.784.000		22.391.000		85.480.000	PAD
	<b>Jumlah korban bencana yang menerima bantuan makanan</b>	<b>Orang</b>	70	28.784.000	70	22.391.000	215	85.480.000	PAD
<b>Penyediaan Sandang</b>				20.000.000		21.000.000		61.668.100	PAD

	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang	Orang	70	20.000.000	70	21.000.000	70	61.668.100	PAD
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				14.000.000		15.000.000		40.700.000	PAD
	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan evakuasi	Orang	10	14.000.000	10	15.000.000	30	40.700.000	PAD
Pelayanan Dukungan Psikososial				10.000.000		15.000.000		30.850.000	PAD
	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan psikososial	Orang	10	10.000.000	15	15.000.000	33	30.850.000	PAD
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000		45.000.000		112.549.250	PAD
	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan dan pencegahan bencana	Orang	1	50.000.000	1	45.000.000	1	112.549.250	PAD
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				25.000.000		25.000.000		61.699.250	PAD
	Jumlah kampung siaga bencana yang dibina	Desa	30	25.000.000	35	25.000.000	65	61.699.250	PAD
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				25.000.000		20.000.000		50.850.000	PAD
	Jumlah Taruna siaga bencana yang dibina	Orang	10	25.000.000	15	20.000.000	31	50.850.000	PAD
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terehabilitasi	%	100	11.717.714.840	100	11.572.030.000	100	33.969.301.319	PAD

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				662.236.750		603.983.000		1.850.656.225	PAD
	<b>Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif</b>	%	39	662.236.750	40	603.983.000	50	1.850.656.225	PAD
<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>				5.848.600		10.000.000		21.696.600	PAD
	<b>Jumlah pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) yang dilaksanakan</b>	<b>Keg</b>	1	5.848.600	1	10.000.000	1	21.696.600	PAD
<b>Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT</b>				5.848.600		10.000.000		21.696.600	PAD
	<b>Jumlah komunitas adat terpencil yang mendapat pemberdayaan sosial</b>	<b>Komunitas</b>	1	5.848.600	1	10.000.000	1	21.696.600	PAD
<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				5.849.875		15.000.000		26.699.850	PAD
	<b>Jumlah lembaga yang mendapat ijin pengumpulan sumbangan</b>	<b>lembaga</b>	2	5.849.875	2	15.000.000	2	26.699.850	PAD
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>				5.849.875		15.000.000		26.699.850	PAD
	<b>Jumlah dunia usaha/lembaga yang terfasilitasi Penerbitan Ijinnya</b>	<b>lembaga</b>	2	5.849.875	2	15.000.000	2	26.699.850	PAD
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				650.538.275		578.983.000		1.802.259.775	PAD



	Jumlah PSKS yang mendapat pengembangan potensi	PSKS	7	650.538.275	7	578.983.000	7	1.802.259.775	PAD
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				357.688.550		325.000.000		1.034.338.100	PAD
	Jumlah TKSK yang mendapat pembinaan	Orang	27	357.688.550	27	325.000.000	27	1.034.338.100	PAD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				5.849.825		20.000.000		31.699.650	PAD
	jumlah masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan	keluarga	5	5.849.825	10	20.000.000	25	31.699.650	PAD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				275.000.000		213.983.000		692.522.325	PAD
	Jumlah LKS/PSKS yang mendapat pembinaan	lembaga	4	275.000.000	4	213.983.000	4	692.522.325	PAD
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				11.999.900		20.000.000		43.699.700	PAD
	Jumlah petugas dan pendamping sosial mendapat pembinaan	Orang	10	11.999.900	10	20.000.000	30	43.699.700	PAD
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				1.514.566.000		1.676.951.000		4.798.024.194	PAD

	<b>Persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>	%	100	1.514.566.000	100	1.676.951.000	100	4.798.024.194	PAD
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				1.120.400.000		1.296.951.000		3.793.427.994	PAD
	<b>Jenis PPKS yang tertangani sesuai SPM</b>	<b>Jenis</b>	5	1.120.400.000	5	1.296.951.000	5	3.793.427.994	PAD
<b>Penyediaan Permakanan</b>				750.000.000		800.000.000		2.611.602.000	PAD
	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan</b>	<b>Orang</b>	300	750.000.000	270	800.000.000	901	2.611.602.000	PAD
<b>Penyediaan Sandang</b>				150.000.000		116.951.000		413.201.000	PAD
	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan sandang</b>	<b>Orang</b>	100	150.000.000	100	116.951.000	300	413.201.000	PAD
<b>Penyediaan Alat Bantu</b>				125.000.000		125.000.000		347.274.994	PAD
	<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar menerima bantuan alat bantu</b>	<b>Orang</b>	27	125.000.000	27	125.000.000	81	347.274.994	PAD

<b>Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</b>				15.400.000		15.000.000		45.800.000	PAD
	<b>Jumlah PPKS terlantar mendapat pelayanan reunifikasi keluarga</b>	<b>PPKS</b>	3	15.400.000	3	15.000.000	9	45.800.000	PAD
<b>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</b>				40.000.000		50.000.000		128.000.000	PAD
	<b>Jumlah PPKS terlantar yang menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</b>	<b>PPKS</b>	6	40.000.000	7	50.000.000	18	128.000.000	PAD
<b>Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</b>				20.000.000		25.000.000		50.850.000	PAD
	<b>Jumlah PPKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</b>	<b>PPKS</b>	6	20.000.000	6	25.000.000	18	50.850.000	PAD
<b>Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>				10.000.000		15.000.000		30.850.000	PAD
	<b>Jumlah PPKS terlantar yang menerima Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>	<b>PPKS</b>	6	10.000.000	6	15.000.000	18	30.850.000	PAD
<b>Pemberian Layanan Rujukan</b>				10.000.000		150.000.000		165.850.000	PAD
	<b>Jumlah PPKS terlantar yang menerima layanan rujukan</b>	<b>PPKS</b>	6	10.000.000	6	150.000.000	18	165.850.000	PAD

Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				394.166.000		380.000.000		1.004.596.200	PAD
	Jenis PPKS Yang tertangani diluar SPM	Jenis	20	394.166.000	20	380.000.000	20	1.004.596.200	PAD
Penyediaan Permakanan				125.000.000		125.000.000		345.882.000	PAD
	Jumlah PPKS bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar panti yang menerima bantuan permakanan	Orang	200	125.000.000	200	125.000.000	250	345.882.000	PAD
Penyediaan Alat Bantu				100.000.000		100.000.000		205.850.000	PAD
	Jumlah penyandang disabilitas bukan korban HIV / AIDS dan Napza di luar panti yang menerima bantuan alat bantu	Orang	27	100.000.000	30	100.000.000	84	205.850.000	PAD
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				90.900.000		60.000.000		221.099.950	PAD
	Jumlah PPKS Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan Napza di luar yang menerima pembinaan	PPKS	6	90.900.000	6	60.000.000	18	221.099.950	PAD
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA				20.000.000		25.000.000		62.548.525	PAD

	Jumlah PPKS lainya bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar yang mendapatkan bimbingan sosial	Orang	6	20.000.000	6	25.000.000	18	62.548.525	PAD
<b>Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</b>				20.000.000		25.000.000		56.699.925	PAD
	Jumlah PPKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	PPKS	6	20.000.000	20	25.000.000	36	56.699.925	PAD
<b>Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>				11.000.000		15.000.000		31.850.000	PAD
	Jumlah PPKS lainnya yang menerima fasilitasi Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	PPKS	6	11.000.000	10	15.000.000	26	31.850.000	PAD
<b>Pemberian Layanan Rujukan</b>				17.266.000		15.000.000		49.815.800	PAD
	Jumlah PPKS lainnya yang menerima layanan rujukan	PPKS	6	17.266.000	10	15.000.000	26	49.815.800	PAD
<b>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</b>				10.000.000		15.000.000		30.850.000	PAD
	Jumlah lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	lembaga	2	10.000.000	2	15.000.000	2	30.850.000	PAD

X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.540.912.090		9.291.096.000		27.320.620.900	PAD
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	45.000.000	100	52.000.000	100	128.691.175	PAD
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				45.000.000		52.000.000		128.691.175	PAD
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	45.000.000	4	52.000.000	12	128.691.175	PAD
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000		20.000.000		45.849.875	PAD
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	15.000.000	3	20.000.000	3	45.849.875	PAD
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000		32.000.000		82.841.300	PAD
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	30.000.000	12	32.000.000	12	82.841.300	PAD
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	6.344.412.008	100	6.400.000.000	100	18.597.835.562	PAD
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.344.412.008		6.400.000.000		18.597.835.562	PAD

	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	6.344.412.008	3	6.400.000.000	3	18.597.835.562	PAD
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.267.612.008		6.250.000.000		18.307.835.562	PAD
	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Orang	46	6.267.612.008	46	6.250.000.000	46	18.307.835.562	PAD
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			76.800.000		150.000.000		290.000.000	PAD
	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	15	76.800.000	15	150.000.000	45	290.000.000	PAD
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	279.977.280	100	207.096.000	100	617.368.502	PAD
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			279.977.280		207.096.000		617.368.502	PAD
	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	279.977.280	3	207.096.000	3	617.368.502	PAD
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			74.982.000		22.096.000		127.017.000	PAD
	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	6	74.982.000	4	22.096.000	4	127.017.000	PAD
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			200.000.000		175.000.000		470.358.000	PAD
	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	13	200.000.000	15	175.000.000	38	470.358.000	PAD
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.995.280		10.000.000		19.993.502	PAD

	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	5	4.995.280	6	10.000.000	7	19.993.502	PAD
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	2.871.522.802	100	2.632.000.000	100	7.976.725.661	PAD
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			789.102.192		737.000.000		2.339.587.992	PAD
	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	789.102.192	6	737.000.000	6	2.339.587.992	PAD
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			15.000.000		20.000.000		42.098.500	PAD
	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	15.000.000	15	20.000.000	32	42.098.500	PAD
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.000.000		90.000.000		233.606.000	PAD
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	80.000.000	5	90.000.000	15	233.606.000	PAD
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			14.999.192		17.000.000		39.480.692	PAD
	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	12	14.999.192	15	17.000.000	15	39.480.692	PAD
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			199.929.000		200.000.000		604.928.000	PAD
	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	199.929.000	12	200.000.000	36	604.928.000	PAD



<b>X.XX.01.2.06.05</b> <b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>				50.000.000		60.000.000		150.000.000	PAD
	<b>Jumlah cetakan yang tersedia</b>	<b>Buah</b>	4	25.000.000	5	30.000.000	5	75.000.000	PAD
	<b>Jumlah penggandaan yang tersedia</b>	<b>Lbr</b>	3	25.000.000	3	30.000.000	12	75.000.000	PAD
<b>X.XX.01.2.06.09</b> <b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>				429.174.000		350.000.000		1.269.474.800	PAD
	<b>Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan</b>	<b>Kali</b>	400	429.174.000	400	350.000.000	400	1.269.474.800	PAD
<b>X.XX.01.2.08</b> <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				1.423.195.610		1.350.000.000		4.088.487.669	PAD
	<b>Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia</b>	<b>Jenis</b>	3	1.423.195.610	3	1.350.000.000	3	4.088.487.669	PAD
<b>X.XX.01.2.08.02</b> <b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>				199.999.850		200.000.000		599.999.809	PAD
	<b>Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola</b>	<b>Bulan</b>	12	199.999.850	12	200.000.000	36	599.999.809	PAD
<b>X.XX.01.2.08.04</b> <b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>				1.223.195.760		1.150.000.000		3.488.487.860	PAD
	<b>Jumlah Pegawai Non ASN</b>	<b>Orang</b>	47	1.223.195.760	47	1.150.000.000	141	3.488.487.860	PAD
<b>X.XX.01.2.09</b> <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>				659.225.000		545.000.000		1.548.650.000	PAD

Urusan Pemerintahan Daerah									
	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	659.225.000	5	545.000.000	5	1.548.650.000	PAD
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			315.000.000		250.000.000		744.620.000	PAD
	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	30	315.000.000	30	250.000.000	30	744.620.000	PAD
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel			15.000.000		20.000.000		44.960.000	PAD
	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	10	15.000.000	10	20.000.000	10	44.960.000	PAD
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			60.000.000		75.000.000		189.900.000	PAD
	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	60.000.000	20	75.000.000	20	189.900.000	PAD
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			269.225.000		200.000.000		569.170.000	PAD
	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	6	269.225.000	6	200.000.000	6	569.170.000	PAD
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

	Indeks Desa Membangun	%	0.688	6.111.268.561	0.694	6.223.499.000	0.694	18.491.698.802	PAD
	Persentase desa yang meningkat statusnya	%	70	6.111.268.561	80	6.223.499.000	100	18.491.698.802	PAD
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>				495.321.000		499.461.000		1.488.331.993	PAD
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	30	495.321.000	40	499.461.000	100	1.488.331.993	PAD
<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>				495.321.000		499.461.000		1.488.331.993	PAD
	Jumlah desa yang mendapat penataan desa	Desa	50	495.321.000	50	499.461.000	150	1.488.331.993	PAD
<b>Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</b>				10.000.000		10.000.000		25.849.993	PAD
	Jumlah desa yang difasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	5	10.000.000	5	10.000.000	15	25.849.993	PAD
<b>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa</b>				485.321.000		489.461.000		1.462.482.000	PAD
	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi sarana prasarana desa	Desa	10	485.321.000	12	489.461.000	30	1.462.482.000	PAD
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>				31.815.000		32.081.000		95.598.500	PAD
	Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	%	2	31.815.000	2	32.081.000	2	95.598.500	PAD
<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>				31.815.000		32.081.000		95.598.500	PAD

	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi	kerja sama	5	31.815.000	5	32.081.000	15	95.598.500	PAD
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				10.000.000		10.000.000		25.852.500	PAD
	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	kerja sama	3	10.000.000	3	10.000.000	8	25.852.500	PAD
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				21.815.000		22.081.000		69.746.000	PAD
	Jumlah Kawasan Perdesaan Yang di Fasilitasi	kawasan	1	21.815.000	1	22.081.000	1	69.746.000	PAD
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>				4.460.463.561		4.558.897.000		13.524.300.069	PAD
	Persentase desa dengan administrasi baik	%	30	4.460.463.561	40	4.558.897.000	100	13.524.300.069	PAD
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				4.460.463.561		4.558.897.000		13.524.300.069	PAD
	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Desa	100	4.460.463.561	101	4.558.897.000	301	13.524.300.069	PAD
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				50.000.000		35.000.000		115.850.000	PAD
	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan desa	Desa	301	50.000.000	301	35.000.000	301	115.850.000	PAD
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				4.027.979.736		4.027.979.736		12.083.939.208	PAD

	Jumlah desa yang mendapat fasilitas pengelolaan keuangan desa	Desa	301	4.027.979.736	301	4.027.979.736	301	12.083.939.208	PAD
<b>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>				50.000.000		55.917.264		117.617.264	PAD
	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Orang	100	50.000.000	100	55.917.264	250	117.617.264	PAD
<b>Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa</b>				125.000.000		50.000.000		220.850.000	PAD
	Jumlah Bumdes dan lembaga kerjasama anatar desa yang mendapat pembinaan	lembaga	10	125.000.000	12	50.000.000	27	220.850.000	PAD
<b>Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</b>				100.000.000		225.000.000		674.999.800	PAD
	Jumlah desa yang mengadakan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Desa	5	100.000.000	5	225.000.000	37	674.999.800	PAD
<b>Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</b>				20.000.000		25.000.000		50.849.993	PAD
	Jumlah desa yang mendapat fasilitas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	Desa	10	20.000.000	15	25.000.000	30	50.849.993	PAD

<b>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</b>				10.000.000		20.000.000		35.850.000	PAD
	<b>Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)</b>	Desa	7	10.000.000	7	20.000.000	21	35.850.000	PAD
<b>Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</b>				27.484.000		50.000.000		83.333.993	PAD
	<b>Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa</b>	Desa	10	27.484.000	30	50.000.000	45	83.333.993	PAD
<b>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD</b>				10.000.000		15.000.000		30.849.993	PAD
	<b>Jumlah desa yang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nya mendapat pembinaan</b>	Desa	7	10.000.000	10	15.000.000	22	30.849.993	PAD
<b>Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa</b>				9.999.825		10.000.000		25.849.818	PAD
	<b>Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batasnya</b>	Desa	3	9.999.825	3	10.000.000	9	25.849.818	PAD
<b>Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa</b>				20.000.000		25.000.000		50.850.000	PAD
	<b>Jumlah desa yang mendapat pembinaan penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Desa</b>	Desa	10	20.000.000	15	25.000.000	30	50.850.000	PAD
<b>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</b>				10.000.000		20.000.000		33.460.000	PAD

	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Desa	3	10.000.000	3	20.000.000	9	33.460.000	PAD
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>				1.123.669.000		1.133.060.000		3.383.468.240	PAD
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	100	1.123.669.000	100	1.133.060.000	100	3.383.468.240	PAD
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				1.123.669.000		1.133.060.000		3.383.468.240	PAD
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	lembaga	6	1.123.669.000	6	1.133.060.000	6	3.383.468.240	PAD
<b>Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat</b>				5.850.000		5.850.000		17.550.000	PAD
	Jumlah masyarakat hukum adat yang di inventarisir	Orang	5	5.850.000	5	5.850.000	5	17.550.000	PAD
<b>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga</b>				972.819.000		952.210.000		2.887.968.440	PAD

Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan	lembaga	6	972.819.000	6	952.210.000	18	2.887.968.440	PAD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				90.000.000		100.000.000		268.699.800	PAD
	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina	lembaga	20	90.000.000	20	100.000.000	60	268.699.800	PAD
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				20.000.000		30.000.000		105.850.000	PAD
	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	lembaga	7	20.000.000	7	30.000.000	21	105.850.000	PAD



<b>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</b>				10.000.000		15.000.000		30.850.000	PAD
	<b>Jumlah lembaga usaha ekonomi masyarakat desa yang dibina</b>	<b>lembaga</b>	5	10.000.000	5	15.000.000	5	30.850.000	PAD
<b>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</b>				25.000.000		30.000.000		72.550.000	PAD
	<b>Jumlah fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna</b>	<b>Kali</b>	12	25.000.000	12	30.000.000	12	72.550.000	PAD

## **II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Dinsospermasdes Kab. Banyumas mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga lainnya yang langsung ditujukan Dinsospermasdes Kab. Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

# BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah Perubahan 2022 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas Perubahan 2022 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan 2022.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Perubahan 2022 adalah **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Perubahan 2022 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2023 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Perubahan 2022 ditujukan pada **“Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing

4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

**Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Perubahan 2022** sesuai RPJMD tahun 2018-2023 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan–kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk **Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM** dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Perubahan 2022 yaitu sebagai berikut :

- 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
- 2 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- 3 Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah
- 4 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
- 5 Pengembangan smart goverment dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

### III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinsospermasdes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perumusan kebijakan teknis kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah, pelaksanaan kebijakan kesekretariatan dan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah, membantu Bupati Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Untuk mewujudkan visi tersebut, diwujudkan dalam misi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

- ✓ **Misi ke-1** : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat dan tujuan ke 1 yaitu Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik serta sasaran ke Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan sasaran ke 3 yaitu Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan inidikator sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- ✓ **Misi ke-2** : Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok Pada tujuan ke 3 yaitu Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan dan sasaran ke 7 yaitu Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan indikator sasaran Persentase penurunan penduduk miskin.
- ✓ **Misi ke-8** : Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious dan Tujuan ke 9 yaitu Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat serta sasaran ke 21 yaitu Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara dengan indikator sasaran Persentase penurunan konflik sosial.

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ( PPKS )	Meningkatnya penanganan social
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pemabngunaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan

### III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinsospermasdes mempunyai 10 program, 19 kegiatan DAN 66 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lima bidang dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana Perubahan 2022 yaitu Rp 21.028.374.000,- dengan sumber pendanaan APBD Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Perubahan 2022 .

Tabel T-C.33  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023**  
**DINSOSPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS**  
**Perubahan 2022**  
**Kabupaten Banyumas**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Banyumas  
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Perubahan 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
						Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan				Nasional	Daerah			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	6								13,593,785,540	10,732,739,604	13,646,844,944				13,562,457,000			
1	6	1							9,540,912,090	7,691,742,538	8,215,238,778			100 %	9,286,096,000			
1	6	1.01							45,000,000	20,000,000	20,000,000			4 dokumen	52,000,000			

1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun					4 Dokumen	4 Dokumen	15,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	4 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan rapat kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan					12 Kegiatan	12 Kegiatan	30,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	12 Kegiatan	32,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis		Jenis	5 Jenis	5 Jenis	6,344,412,008	5,230,550,660	5,626,309,800							5 Jenis	6,400,000,000		
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya						46 Orang	46 Orang	6,267,612,008	5,160,220,660	5,555,979,800	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	46 Orang	6,250,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa



1	6	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD				15 Orang	15 Orang	76,800,000	70,330,000	70,330,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	15 Orang	150,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis		Jenis	10 Jenis	10 Jenis	<b>789,102,192</b>	<b>418,465,950</b>	<b>467,197,050</b>						10 Jenis	<b>737,000,000</b>	
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia				10 Jenis	10 Jenis	15,000,000	13,720,000	13,720,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	10 Jenis	20,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia				50 Jenis	50 Jenis	80,000,000	30,174,000	30,174,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	50 Jenis	90,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia				12 Jenis	12 Jenis	14,999,192	13,714,860	23,715,860	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	12 Jenis	17,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia				12 Bulan	12 Bulan	199,929,000	125,000,000	125,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	12 Bulan	200,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Jumlah cetakan yang tersedia				4 Buah	4 Buah	50,000,000	35,857,290	35,857,290	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	4 Buah	60,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi / Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi / Pusat yang dilaksanakan				400 Kali	400 Kali	429,174,000	199,999,800	238,729,900	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	400 Kali	350,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	1	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Unit		Unit	13 Unit	13 Unit	279,977,280	162,522,215	212,030,215			13 Unit	207,096,000	
---	---	---	------	--	--	------	--	------	---------	---------	-------------	-------------	-------------	--	--	---------	-------------	--

1	6	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia			6 Unit	6 Unit	74,982,000	10,992,000	10,992,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	6 Unit	22,096,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia			13 Jenis	13 Jenis	200,000,000	50,000,000	99,508,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	13 Jenis	175,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia			5 Unit	5 Unit	4,995,280	101,530,215	101,530,215	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	5 Unit	10,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis		Jenis	44 Jenis	44 Jenis	1,423,195,610	1,396,328,713	1,381,328,713		44 Jenis	1,350,000,000					
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola			12 Bulan	12 Bulan	199,999,850	182,935,233	167,935,233	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	12 Bulan	200,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN			45 Orang	45 Orang	1,223,195,760	1,213,393,480	1,213,393,480	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	45 Orang	1,150,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	7 Jenis	7 Jenis	659,225,000	463,875,000	508,373,000					7 Jenis	540,000,000		

1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara					30 Unit	30 Unit	315,000,000	230,000,000	244,498,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	30 Unit	250,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
1	6	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara					10 Unit	10 Unit	15,000,000	6,000,000	11,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	10 Unit	20,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara					20 Unit	20 Unit	60,000,000	27,900,000	37,900,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	20 Unit	70,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara					6 Unit	6 Unit	269,225,000	199,975,000	214,975,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	6 Unit	200,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
1	6	2			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang	%		%		39 %	39 %	<b>662,236,750</b>	<b>643,346,375</b>	<b>711,746,375</b>							39 %	<b>603,983,000</b>	



1	6	2	2.02		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah lembaga yang mendapat ijin pengumpulan sumbangan	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	2 Lembaga	5,849,875	5,849,375	5,849,375				2 Lembaga	15,000,000			
1	6	2	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dunia usaha/lembaga yang terfasilitasi Penerbitan Ijinnya				2 lembaga	2 lembaga	5,849,875	5,849,375	5,849,375	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	2 lembaga	15,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	2	2.03		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah PSKS yang mendapat pengembangan potensi	PSKS		PSKS	7 PSKS	7 PSKS	650,538,275	637,497,000	705,897,000					7 PSKS	578,983,000		
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang mendapat pembinaan				30 Orang	30 Orang	357,688,550	521,170,000	589,570,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	30 Orang	325,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	2	2.03	3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan				5 Orang	5 Orang	5,849,825	5,351,000	5,351,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	5 Orang	20,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah LKS/PSKS yang mendapat pembinaan									4 lembaga	4 lembaga						Kab. Banyumas, Sumbang, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia	2. Percepatan penanggula			4 lembaga			Dinas Sosial Dan
1	6	2	03	4	Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						275,000,000	100,000,000	100,000,000								Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan		Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	ngan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah			213,983,000			Pemberdaaan Masyarakat Dan Desa
1	6	2	03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah petugas dan pendamping sosial mendapat pembinaan									10 Orang	10 Orang	11,999,900	10,976,000	10,976,000		Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	10 Orang	20,000,000			Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
1	6	4			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %		0 %	100 %	100 %	1,514,566,000	661,999,766	661,999,766													100 %	1,676,951,000			



1	6	4	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jenis PPKS yang tertangani sesuai SPM	5 Jenis	0 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	1,120,400,000	476,999,766	476,999,766				5 Jenis	1,296,951,000	
---	---	---	------	--	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------------	-------------	-------------	--	--	--	---------	---------------	--

1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan				300 Orang	300 Orang	750,000,000	200,000,000	225,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perangkat Daerah	300 Orang	800,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
---	---	---	------	---	-----------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	--	------------------------------	---	------------------	-----------	-------------	---

1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan sandang				100 Orang	100 Orang	150,000,000	50,000,000	50,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	100 Orang	116,951,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar menerima bantuan alat bantu				27 Orang	27 Orang	125,000,000	149,999,766	65,781,096	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	27 Orang	125,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS terlantar mendapat pelayanan reunifikasi keluarga				3 PMKS	3 PMKS	15,400,000	20,000,000	97,616,670	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	3 PMKS	15,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS terlantar yang menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosia				6 PMKS	6 PMKS	40,000,000	37,500,000	19,102,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	6 PMKS	50,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS terlantar yang menerima fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				13 PMKS	13 PMKS	20,000,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	13 PMKS	25,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS terlantar yang menerima Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6 PMKS	6 PMKS	10,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	6 PMKS	15,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS terlantar yang menerima layanan rujukan				6 PMKS	6 PMKS	10,000,000	6,000,000	6,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Perangkat Daerah	6 PMKS	150,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
---	---	---	------	----	---------------------------	---	--	--	--	--------	--------	------------	-----------	-----------	--	------------------------------	---	--	------------------	--------	-------------	---

1	6	4	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Jenis PPKS Yang tertangani diluar SPM	20 Jenis		0 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	<b>394,166,000</b>	<b>185,000,000</b>	<b>185,000,000</b>						20 Jenis	<b>380,000,000</b>	
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar panti yang menerima bantuan permakanan				200 Orang	200 Orang	125,000,000	30,000,000	30,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	200 Orang	125,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan alat bantu					27 Orang	27 Orang	100,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	27 Orang	100,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS Lainnya yang menerima pembinaan					6 PMKS	6 PMKS	90,900,000	75,000,000	75,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6 PMKS	60,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	4	2.02	8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PMKS yang mendapatkan bimbingan sosial bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA					6 PMKS	6 PMKS	20,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6 PMKS	25,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	4	2.02	9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				15 PMKS	15 PMKS	20,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	15 PMKS	25,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	4	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS lainnya yang menerima fasilitasi Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				6 PMKS	6 PMKS	11,000,000	7,500,000	7,500,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6 PMKS	15,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	4	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS lainnya yang menerima layanan rujukan				6 PMKS	6 PMKS	17,266,000	27,500,000	27,500,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6 PMKS	15,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial			5 Lembaga	5 Lembaga	10,000,000	25,000,000	25,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	5 Lembaga	15,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	5			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang menerima perlindungan Sosial	100 %	0 %	100 %	100 %	<b>1,626,878,700</b>	<b>1,517,949,800</b>	<b>3,840,158,900</b>						100 %	<b>1,719,321,000</b>	
1	6	5	2.01		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan pemeliharaan	18 Anak	0 Anak	5 Anak	5 Anak	<b>10,000,000</b>	<b>7,947,000</b>	<b>7,947,000</b>						5 Anak	<b>20,000,000</b>	
1	6	5	2.01	3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau			5 Anak	5 Anak	10,000,000	7,947,000	7,947,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Anak Terlantar	5 Anak	20,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	5	2.02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah fakir miskin yang didata	450000 Orang	0 Orang	150000 Orang	150000 Orang	<b>1,616,878,700</b>	<b>1,510,002,800</b>	<b>3,832,211,900</b>						150000 Orang	<b>1,699,321,000</b>	
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang mendapat fasilitasi pendataan			916 Orang	916 Orang	525,000,000	299,749,800	299,749,800	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Fakir Miskin	916 Orang	510,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	5	2.	3	Fasilitasi Bantuan Sosial	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosi					1098 Orang			1,075,678,7	1,200,000,0	3,522,209,1	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan	Fakir Miskin	1098 Orang	1,164,321,0	Dinas Sosial Dan Pemberday	
		02			Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial					900 Orang	900 Orang			00	00	00		DBH CHT	Berkualitas Dan Berdaya Saing		900 Orang		00	aan Masyarakat Dan Desa
1	6	5	2.	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah fakir miskin penerima bantuan pengembangan ekonomi yang difasilitasi					30 orang	30 orang	16,200,000	10,253,000	10,253,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Fakir Miskin	30 orang	25,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
1	6	6			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	%	%	100 %	100 %	<b>122,784,000</b>	<b>67,701,125</b>	<b>67,701,125</b>									100 %	<b>118,391,000</b>		



1	6	6	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	72,784,000	51,656,125	51,656,125					100 Orang	73,391,000		
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan makanan			70 Orang	70 Orang	28,784,000	19,999,625	19,999,625	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	70 Orang	22,391,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang			70 Orang	70 Orang	20,000,000	14,890,000	14,890,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	70 Orang	21,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	6	2.01	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan evakuasi			10 Orang	10 Orang	14,000,000	9,840,500	9,840,500	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	10 Orang	15,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan psikososial				10 Orang	10 Orang	10,000,000	6,926,000	6,926,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	10 Orang	15,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
1	6	6	2.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan dan pencegahan bencana	1 Orang		0 Orang	1 Orang	1 Orang	<b>50,000,000</b>	<b>16,045,000</b>	<b>16,045,000</b>						1 Orang	<b>45,000,000</b>		
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	jumlah kampung siaga bencana yang dibina				30 desa	30 desa	25,000,000	6,840,000	6,840,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		0	30 desa	25,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah taruna Siaga bencana yang di bina				10 orang	10 orang	25,000,000	9,205,000	9,205,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran		0	10 orang	20,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1	6	7		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional	%		%	90 %	90 %	126,408,000	150,000,000	150,000,000			90 %	157,715,000	
---	---	---	--	---	--	---	--	---	------	------	-------------	-------------	-------------	--	--	------	-------------	--

1	6	7	2.01	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	126,408,000	150,000,000	150,000,000			1 Unit	157,715,000				
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapat perbaikan dan perawatan			1 Unit	1 Unit	126,408,000	150,000,000	150,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	TMP	1 Unit	157,715,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>																	
2	13			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							6,111,268,561	5,648,052,325	5,505,544,325					6,223,499,000			
2	13	2		<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Persentase desa dengan penataan baik	%		%	30 %	30 %	495,321,000	350,000,000	287,492,000				30 %	499,461,000			
2	13	2	2.01	<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>	Jumlah desa yang mendapat penataan desa	Desa		Desa	50 Desa	50 Desa	495,321,000	350,000,000	287,492,000				50 Desa	499,461,000			

2	13	2	2.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi sarana prasarana desa				10 Desa	10 Desa	485,321,000	350,000,000	287,492,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	10 Desa	489,461,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2	13	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	%		%	2 %	2 %	<b>31,815,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>23,000,000</b>						2 %	<b>32,081,000</b>		
2	13	3	2.01		<b>Fasilitasi Kerjasama antar Desa</b>	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi	Kerjasama		Kerjasama	5 Kerjasama	5 Kerjasama	<b>31,815,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>23,000,000</b>							5 Kerjasama	<b>32,081,000</b>	

2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kotora	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi				3 Kerjasama	3 Kerjasama	10,000,000	8,000,000	8,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	3 Kerjasama	10,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan Yang di Fasilitasi				1 Kawasan	1 Kawasan	21,815,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	1 Kawasan	22,081,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

213	4		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	Persentase desa dengan administrasi baik	%	%	30 %	30 %	4,460,463,561	4,312,026,350	4,232,026,350			30 %	4,558,897,000				
213	4	2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Desa	Desa	100 Desa	100 Desa	4,460,463,561	4,312,026,350	4,232,026,350			100 Desa	4,558,897,000				
213	4	2.01	1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan desa			301 Desa	301 Desa	50,000,000	25,000,000	50,000,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	301 Desa	35,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
213	4	2.01	4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan keuangan desa			301 Desa	301 Desa	4,027,979,736	4,000,000,000	3,800,000,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	301 Desa	4,027,979,736	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparat pemerintah desa yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas				100 Orang	100 Orang	50,000,000	14,999,725	14,999,725	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	100 Orang	55,917,264	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Bumdes dan lembaga kerjasama antar desa yang mendapat pembinaan				5 Lembaga	5 Lembaga	125,000,000	150,000,000	140,000,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	5 Lembaga	50,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang mengadakan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa				5 desa	5 desa	100,000,000	60,000,000	140,000,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	5 desa	225,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa				10 Desa	10 Desa	20,000,000	9,999,750	9,999,750	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	10 Desa	25,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)				7 desa	7 desa	10,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	7 desa	20,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa				10 desa	10 desa	27,484,000	12,734,150	37,734,150	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	10 desa	50,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah desa yang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nya mendapat pembinaan				7 desa	7 desa	10,000,000	7,999,850	7,999,850	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	7 desa	15,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batasnya				3 desa	3 desa	9,999,825	6,000,000	6,000,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	3 desa	10,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Desa				10 desa	10 desa	20,000,000	10,292,875	10,292,875	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Desa	10 desa	25,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	%	100 %	100 %	1,123,669,000	963,025,975	963,025,975							100 %	1,133,060,000	



2	13	5	2.01	<p><b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b></p>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	Lembaga	Lembaga	6 Lembaga	6 Lembaga	1,123,669,000	963,025,975	963,025,975			6 Lembaga	1,133,060,000					
2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah masyarakat hukum adat yang di inventarisir			5 Orang	5 Orang	5,850,000	5,351,000	5,351,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran	Lembaga	5 Orang	5,850,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan	6 Lembaga	6 Lembaga	972,819,000	920,000,000	920,000,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Lembaga	6 Lembaga	952,210,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
---	----	---	------	---	--	--	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	---	------------------------------	---	--	---------	-----------	-------------	---

213	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina					20 Lembaga	20 Lembaga	90,000,000	15,000,000	15,000,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Lembaga	20 Lembaga	100,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
-----	---	------	---	--	---	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	---	------------------------------	---	--	---------	------------	-------------	---

213	5	2.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat bantuan sarana dan prasaran					7 Lembaga	7 Lembaga	20,000,000	10,000,000	10,000,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Lembaga	7 Lembaga	30,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
-----	---	------	---	---	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------------	------------	------------	---	------------------------------	---	--	---------	-----------	------------	---

2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah lembaga usaha ekonomi masyarakat desa yang dibina				5 Lembaga	5 Lembaga	10,000,000	7,674,975	7,674,975	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Lembaga	5 Lembaga	15,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna				12 Kali	12 Kali	25,000,000	5,000,000	5,000,000	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Lembaga	12 Kali	30,000,000	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
<b>TOTAL</b>												<b>19,679,205,501</b>	<b>16,380,791,929</b>	<b>19,152,389,269</b>						<b>19,745,956,000</b>		

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

**Matrik Anggaran Perubahan Tahun 2022**  
**DINSOSPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS**  
**Kabupaten Banyumas**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan, dan subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Sumber Dana
			2022		2023		Target Akhir Renstra		
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	15.350.669.081	100	13.497.457.000	100	39.687.320.556	PAD
	Presentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	%	100	148.000.000	100	87.715.000	100	366.304.650	PAD
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>				148.000.000		87.715.000		366.304.650	PAD
	Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional		1	148.000.000	1	87.715.000	1	366.304.650	PAD
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				148.000.000		87.715.000		366.304.650	PAD
	Jumlah taman makam pahlawan yang dipelihara	Unit	1	148.000.000	1	87.715.000	1	366.304.650	PAD
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>				148.000.000		87.715.000		366.304.650	PAD
	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapat perbaikan dan perawatan	Unit	1	148.000.000	1	87.715.000	1	366.304.650	PAD

	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlindungi	%	100	5.496.467.991	100	1.837.712.000	100	5.351.714.587	PAD
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>				5.380.767.841		1.719.321.000		5.020.467.237	PAD
	Persentase PPKS yang menerima perlindungan Sosial	%	100	5.380.767.841	100	1.719.321.000	100	5.020.467.237	PAD
<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>				7.947.000		20.000.000		36.000.000	PAD
	Jumlah anak terlantar yang menerima pelayanan pemeliharaan	anak	5	7.947.000	10	20.000.000	18	36.000.000	PAD
<b>Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar</b>				7.947.000		20.000.000		36.000.000	PAD
	Jumlah anak terlantar yang dipantau	anak	5	7.947.000	10	20.000.000	18	36.000.000	PAD
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				5.372.820.841		1.699.321.000		4.984.467.237	PAD
	Jumlah fakir miskin yang didata	Orang	150000	5.372.820.841	150000	1.699.321.000	150000	4.984.467.237	PAD
<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				291.343.300		510.000.000		1.517.578.400	PAD
	Jumlah fakir miskin yang mendapat fasilitasi pendataan	Orang	150000	291.343.300	150000	510.000.000	150000	1.517.578.400	PAD
<b>Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga</b>				5.073.744.541		1.164.321.000		3.425.688.837	PAD
	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial	Orang	900	5.073.744.541	875	1.134.321.000	2.691	3.335.688.837	PAD
	Jumlah pendamping PKH yang difasilitasi	Orang	300		300	30.000.000	300	90.000.000	PAD

<b>Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat</b>				7.733.000		25.000.000		41.200.000	PAD
	<b>Jumlah fakir miskin penerima bantuan pengembangan ekonomi yang difasilitasi</b>	<b>Orang</b>	30	7.733.000	35	25.000.000	65	41.200.000	PAD
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>				115.700.150		118.391.000		331.247.350	PAD
	<b>Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat</b>	<b>%</b>	100	115.700.150	100	118.391.000	100	331.247.350	PAD
<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>				74.366.150		73.391.000		218.698.100	PAD
	<b>Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial</b>	<b>Orang</b>	100	74.366.150	100	73.391.000	300	218.698.100	PAD
<b>Penyediaan Makanan</b>				42.693.500		22.391.000		85.480.000	PAD
	<b>Jumlah korban bencana yang menerima bantuan makanan</b>	<b>Orang</b>	70	42.693.500	70	22.391.000	215	85.480.000	PAD
<b>Penyediaan Sandang</b>				17.801.400		21.000.000		61.668.100	PAD
	<b>Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang</b>	<b>Orang</b>	70	17.801.400	70	21.000.000	70	61.668.100	PAD
<b>Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan</b>				7.280.500		15.000.000		40.700.000	PAD



	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan evakuasi	Orang	10	7.280.500	10	15.000.000	30	40.700.000	PAD
<b>Pelayanan Dukungan Psikososial</b>				6.590.750		15.000.000		30.850.000	PAD
	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan psikososial	Orang	10	6.590.750	15	15.000.000	33	30.850.000	PAD
<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>				41.334.000		45.000.000		112.549.250	PAD
	Jumlah Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan dan pencegahan bencana	Orang	1	41.334.000	1	45.000.000	1	112.549.250	PAD
<b>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana</b>				1.807.500		25.000.000		61.699.250	PAD
	Jumlah kampung siaga bencana yang dibina	Desa	30	1.807.500	35	25.000.000	65	61.699.250	PAD
<b>Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana</b>				39.526.500		20.000.000		50.850.000	PAD
	Jumlah Taruna siaga bencana yang dibina	Orang	10	39.526.500	15	20.000.000	31	50.850.000	PAD
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhabilitasi	%	100	9.706.201.090	100	11.572.030.000	100	33.969.301.319	PAD
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>				757.712.875		603.983.000		1.850.656.225	PAD

	Persentase lembaga masyarakat (PSKS) yang aktif	%	39	757.712.875	40	603.983.000	50	1.850.656.225	PAD
<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>						10.000.000		21.696.600	PAD
	Jumlah pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) yang dilaksanakan	Keg	1		1	10.000.000	1	21.696.600	PAD
<b>Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT</b>						10.000.000		21.696.600	PAD
	Jumlah komunitas adat terpencil yang mendapat pemberdayaan sosial	Komunitas	1		1	10.000.000	1	21.696.600	PAD
<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				5.849.375		15.000.000		26.699.850	PAD
	Jumlah lembaga yang mendapat ijin pengumpulan sumbangan	lembaga	2	5.849.375	2	15.000.000	2	26.699.850	PAD
<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</b>				5.849.375		15.000.000		26.699.850	PAD
	Jumlah dunia usaha/lembaga yang terfasilitasi Penerbitan Ijinnya	lembaga	2	5.849.375	2	15.000.000	2	26.699.850	PAD
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>				751.863.500		578.983.000		1.802.259.775	PAD

	Jumlah PSKS yang mendapat pengembangan potensi	PSKS	7	751.863.500	7	578.983.000	7	1.802.259.775	PAD
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				615.600.000		325.000.000		1.034.338.100	PAD
	Jumlah TKSK yang mendapat pembinaan	Orang	27	615.600.000	27	325.000.000	27	1.034.338.100	PAD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				2.567.500		20.000.000		31.699.650	PAD
	jumlah masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan	keluarga	5	2.567.500	10	20.000.000	25	31.699.650	PAD
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				125.000.000		213.983.000		692.522.325	PAD
	Jumlah LKS/PSKS yang mendapat pembinaan	lembaga	4	125.000.000	4	213.983.000	4	692.522.325	PAD
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				8.696.000		20.000.000		43.699.700	PAD
	Jumlah petugas dan pendamping sosial mendapat pembinaan	Orang	10	8.696.000	10	20.000.000	30	43.699.700	PAD
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				696.999.766		1.676.951.000		4.798.024.194	PAD

	<b>Persentase PPKS terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>	%	100	696.999.766	100	1.676.951.000	100	4.798.024.194	PAD
<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>				518.736.666		1.296.951.000		3.793.427.994	PAD
	<b>Jenis PPKS yang tertangani sesuai SPM</b>	Jenis	5	518.736.666	5	1.296.951.000	5	3.793.427.994	PAD
<b>Penyediaan Permakanan</b>				255.000.000		800.000.000		2.611.602.000	PAD
	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan</b>	Orang	300	255.000.000	270	800.000.000	901	2.611.602.000	PAD
<b>Penyediaan Sandang</b>				50.000.000		116.951.000		413.201.000	PAD
	<b>Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan sandang</b>	Orang	100	50.000.000	100	116.951.000	300	413.201.000	PAD
<b>Penyediaan Alat Bantu</b>				64.000.896		125.000.000		347.274.994	PAD
	<b>Jumlah penyandang disabilitas terlantar menerima bantuan alat bantu</b>	Orang	27	64.000.896	27	125.000.000	81	347.274.994	PAD

<b>Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</b>				108.378.870		15.000.000		45.800.000	PAD
	<b>Jumlah PPKS terlantar mendapat pelayanan reunifikasi keluarga</b>	<b>PPKS</b>	3	108.378.870	3	15.000.000	9	45.800.000	PAD
<b>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</b>				22.094.000		50.000.000		128.000.000	PAD
	<b>Jumlah PPKS terlantar yang menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</b>	<b>PPKS</b>	6	22.094.000	7	50.000.000	18	128.000.000	PAD
<b>Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</b>				7.500.000		25.000.000		50.850.000	PAD
	<b>Jumlah PPKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</b>	<b>PPKS</b>	6	7.500.000	6	25.000.000	18	50.850.000	PAD
<b>Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>				6.000.000		15.000.000		30.850.000	PAD
	<b>Jumlah PPKS terlantar yang menerima Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>	<b>PPKS</b>	6	6.000.000	6	15.000.000	18	30.850.000	PAD
<b>Pemberian Layanan Rujukan</b>				5.762.900		150.000.000		165.850.000	PAD

	Jumlah PPKS terlantar yang menerima layanan rujukan	PPKS	6	5.762.900	6	150.000.000	18	165.850.000	PAD
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				178.263.100		380.000.000		1.004.596.200	PAD
	Jenis PPKS Yang tertangani diluar SPM	Jenis	20	178.263.100	20	380.000.000	20	1.004.596.200	PAD
Penyediaan Permakanan				0		125.000.000		345.882.000	PAD
	Jumlah PPKS bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar panti yang menerima bantuan permakanan	Orang	200	0	200	125.000.000	250	345.882.000	PAD
Penyediaan Alat Bantu				1.390.000		100.000.000		205.850.000	PAD
	Jumlah penyandang disabilitas bukan korban HIV / AIDS dan Napza di luar panti yang menerima bantuan alat bantu	Orang	27	1.390.000	30	100.000.000	84	205.850.000	PAD
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				107.290.600		60.000.000		221.099.950	PAD
	Jumlah PPKS Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan Napza di luar yang menerima pembinaan	PPKS	6	107.290.600	6	60.000.000	18	221.099.950	PAD
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan				7.000.000		25.000.000		62.548.525	PAD

<b>Korban HIV/AIDS dan NAPZA</b>									
	<b>Jumlah PPKS lainya bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar yang mendapatkan bimbingan sosial</b>	<b>Orang</b>	6	7.000.000	6	25.000.000	18	62.548.525	PAD
<b>Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</b>				4.622.500		25.000.000		56.699.925	PAD
	<b>Jumlah PPKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</b>	<b>PPKS</b>	6	4.622.500	20	25.000.000	36	56.699.925	PAD
<b>Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>				7.075.000		15.000.000		31.850.000	PAD
	<b>Jumlah PPKS lainnya yang menerima fasilitasi Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</b>	<b>PPKS</b>	6	7.075.000	10	15.000.000	26	31.850.000	PAD
<b>Pemberian Layanan Rujukan</b>				26.595.000		15.000.000		49.815.800	PAD
	<b>Jumlah PPKS lainnya yang menerima layanan rujukan</b>	<b>PPKS</b>	6	26.595.000	10	15.000.000	26	49.815.800	PAD
<b>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</b>				24.290.000		15.000.000		30.850.000	PAD

	Jumlah lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	lembaga	2	24.290.000	2	15.000.000	2	30.850.000	PAD
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.251.488.449		9.291.096.000		27.320.620.900	PAD
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	33.403.575	100	52.000.000	100	128.691.175	PAD
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.403.575		52.000.000		128.691.175	PAD
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	4	33.403.575	4	52.000.000	12	128.691.175	PAD
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.117.776		20.000.000		45.849.875	PAD
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	11.117.776	3	20.000.000	3	45.849.875	PAD
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22.285.799		32.000.000		82.841.300	PAD
	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	22.285.799	12	32.000.000	12	82.841.300	PAD
	Persentase Kelancaran Administrasi	%	100		100	6.400.000.000	100	18.597.835.562	PAD



	<b>Keuangan Perangkat Daerah</b>								
<b>X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				5.504.475.396		6.400.000.000		18.597.835.562	PAD
	<b>Jumlah administrasi keuangan yang dikelola</b>	<b>Jenis</b>	3	5.504.475.396	3	6.400.000.000	3	18.597.835.562	PAD
<b>X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>				5.417.815.396		6.250.000.000		18.307.835.562	PAD
	<b>Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya</b>	<b>Orang</b>	46	5.417.815.396	46	6.250.000.000	46	18.307.835.562	PAD
<b>X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</b>				86.660.000		150.000.000		290.000.000	PAD
	<b>Jumlah pengelola keuangan SKPD</b>	<b>Orang</b>	15	86.660.000	15	150.000.000	45	290.000.000	PAD
	<b>Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai</b>	<b>%</b>	100	232.937.715	100	207.096.000	100	617.368.502	PAD
<b>X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				232.937.715		207.096.000		617.368.502	PAD
	<b>Jumlah barang milik daerah yang tersedia</b>	<b>Jenis</b>	3	232.937.715	3	207.096.000	3	617.368.502	PAD
<b>X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel</b>				12.157.500		22.096.000		127.017.000	PAD
	<b>Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia</b>	<b>Unit</b>	6	12.157.500	4	22.096.000	4	127.017.000	PAD
<b>X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>				119.250.000		175.000.000		470.358.000	PAD

	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	13	119.250.000	15	175.000.000	38	470.358.000	PAD
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			101.530.215		10.000.000		19.993.502	PAD
	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	5	101.530.215	6	10.000.000	7	19.993.502	PAD
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100		100	2.632.000.000	100	7.976.725.661	PAD
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			512.298.050		737.000.000		2.339.587.992	PAD
	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	512.298.050	6	737.000.000	6	2.339.587.992	PAD
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			13.720.000		20.000.000		42.098.500	PAD
	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	10	13.720.000	15	20.000.000	32	42.098.500	PAD
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			36.354.000		90.000.000		233.606.000	PAD
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	5	36.354.000	5	90.000.000	15	233.606.000	PAD
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			13.714.860		17.000.000		39.480.692	PAD

	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	12	13.714.860	15	17.000.000	15	39.480.692	PAD
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			137.000.000		200.000.000		604.928.000	PAD
	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	137.000.000	12	200.000.000	36	604.928.000	PAD
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			35.857.290		60.000.000		150.000.000	PAD
	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	4		5	30.000.000	5	75.000.000	PAD
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	3		3	30.000.000	12	75.000.000	PAD
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			275.651.900		350.000.000		1.269.474.800	PAD
	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	400	275.651.900	400	350.000.000	400	1.269.474.800	PAD
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.381.328.713		1.350.000.000		4.088.487.669	PAD
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	1.381.328.713	3	1.350.000.000	3	4.088.487.669	PAD
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			167.935.233		200.000.000		599.999.809	PAD
	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	167.935.233	12	200.000.000	36	599.999.809	PAD

X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.213.393.480		1.150.000.000		3.488.487.860	PAD
	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	47	1.213.393.480	47	1.150.000.000	141	3.488.487.860	PAD
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				587.045.000		545.000.000		1.548.650.000	PAD
	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	587.045.000	5	545.000.000	5	1.548.650.000	PAD
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				278.295.000		250.000.000		744.620.000	PAD
	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	30	278.295.000	30	250.000.000	30	744.620.000	PAD
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel				6.000.000		20.000.000		44.960.000	PAD
	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	10	6.000.000	10	20.000.000	10	44.960.000	PAD
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				32.950.000		75.000.000		189.900.000	PAD
	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	20	32.950.000	20	75.000.000	20	189.900.000	PAD
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				269.800.000		200.000.000		569.170.000	PAD

	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	6	269.800.000	6	200.000.000	6	569.170.000	PAD
X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
	Indeks Desa Membangun	%	0.688	5.760.544.325	0.694	6.223.499.000	0.694	18.491.698.802	PAD
	Persentase desa yang meningkat statusnya	%	70	5.760.544.325	80	6.223.499.000	100	18.491.698.802	PAD
<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>				382.492.000		499.461.000		1.488.331.993	PAD
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	30	382.492.000	40	499.461.000	100	1.488.331.993	PAD
<b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>				382.492.000		499.461.000		1.488.331.993	PAD
	Jumlah desa yang mendapat penataan desa	Desa	50	382.492.000	50	499.461.000	150	1.488.331.993	PAD
<b>Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa</b>				80.000.000		10.000.000		25.849.993	PAD
	Jumlah desa yang difasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	5	80.000.000	5	10.000.000	15	25.849.993	PAD
<b>Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa</b>				302.492.000		489.461.000		1.462.482.000	PAD
	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi sarana prasarana desa	Desa	10	302.492.000	12	489.461.000	30	1.462.482.000	PAD
<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>				27.000.000		32.081.000		95.598.500	PAD

	Persentase desa yang membentuk kerjasama antar desa	%	2	27.000.000	2	32.081.000	2	95.598.500	PAD
<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>				27.000.000		32.081.000		95.598.500	PAD
	Jumlah kerjasama antar desa yang difasilitasi	kerja sama	5	27.000.000	5	32.081.000	15	95.598.500	PAD
<b>Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota</b>				8.000.000		10.000.000		25.852.500	PAD
	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	kerja sama	3	8.000.000	3	10.000.000	8	25.852.500	PAD
<b>Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</b>				19.000.000		22.081.000		69.746.000	PAD
	Jumlah Kawasan Perdesaan Yang di Fasilitasi	kawasan	1	19.000.000	1	22.081.000	1	69.746.000	PAD
<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>				4.322.026.350		4.558.897.000		13.524.300.069	PAD
	Persentase desa dengan administrasi baik	%	30	4.322.026.350	40	4.558.897.000	100	13.524.300.069	PAD
<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>				4.322.026.350		4.558.897.000		13.524.300.069	PAD
	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan	Desa	100	4.322.026.350	101	4.558.897.000	301	13.524.300.069	PAD
<b>Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>				50.000.000		35.000.000		115.850.000	PAD
	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan desa	Desa	301	50.000.000	301	35.000.000	301	115.850.000	PAD

<b>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>				3.810.000.000		4.027.979.736		12.083.939.208	PAD
	<b>Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan keuangan desa</b>	<b>Desa</b>	301	3.810.000.000	301	4.027.979.736	301	12.083.939.208	PAD
<b>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>				14.999.725		55.917.264		117.617.264	PAD
	<b>Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas</b>	<b>Orang</b>	100	14.999.725	100	55.917.264	250	117.617.264	PAD
<b>Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa</b>				210.000.000		50.000.000		220.850.000	PAD
	<b>Jumlah Bumdes dan lembaga kerjasama anatar desa yang mendapat pembinaan</b>	<b>lembaga</b>	10	210.000.000	12	50.000.000	27	220.850.000	PAD
<b>Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa</b>				150.000.000		225.000.000		674.999.800	PAD
	<b>Jumlah desa yang mengadakan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa</b>	<b>Desa</b>	5	150.000.000	5	225.000.000	37	674.999.800	PAD
<b>Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</b>				9.999.750		25.000.000		50.849.993	PAD
	<b>Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa</b>	<b>Desa</b>	10	9.999.750	15	25.000.000	30	50.849.993	PAD

<b>Fasilitasi Penyusunan Profil Desa</b>				15.000.000		20.000.000		35.850.000	PAD
	<b>Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)</b>	Desa	7	15.000.000	7	20.000.000	21	35.850.000	PAD
<b>Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</b>				37.734.150		50.000.000		83.333.993	PAD
	<b>Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa</b>	Desa	10	37.734.150	30	50.000.000	45	83.333.993	PAD
<b>Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD</b>				7.999.850		15.000.000		30.849.993	PAD
	<b>Jumlah desa yang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nya mendapat pembinaan</b>	Desa	7	7.999.850	10	15.000.000	22	30.849.993	PAD
<b>Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa</b>				6.000.000		10.000.000		25.849.818	PAD
	<b>Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batasnya</b>	Desa	3	6.000.000	3	10.000.000	9	25.849.818	PAD
<b>Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa</b>				10.292.875		25.000.000		50.850.000	PAD
	<b>Jumlah desa yang mendapat pembinaan penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Desa</b>	Desa	10	10.292.875	15	25.000.000	30	50.850.000	PAD
<b>Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan</b>						20.000.000		33.460.000	PAD



	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Desa	3		3	20.000.000	9	33.460.000	PAD
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>				1.029.025.975		1.133.060.000		3.383.468.240	PAD
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	100	1.029.025.975	100	1.133.060.000	100	3.383.468.240	PAD
<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				1.029.025.975		1.133.060.000		3.383.468.240	PAD
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina	lembaga	6	1.029.025.975	6	1.133.060.000	6	3.383.468.240	PAD
<b>Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat</b>				5.351.000		5.850.000		17.550.000	PAD
	Jumlah masyarakat hukum adat yang di inventarisir	Orang	5	5.351.000	5	5.850.000	5	17.550.000	PAD

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				945.000.000		952.210.000		2.887.968.440	PAD
	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan	lembaga	6	945.000.000	6	952.210.000	18	2.887.968.440	PAD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				18.500.000		100.000.000		268.699.800	PAD
	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina	lembaga	20	18.500.000	20	100.000.000	60	268.699.800	PAD
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				47.500.000		30.000.000		105.850.000	PAD
	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	lembaga	7	47.500.000	7	30.000.000	21	105.850.000	PAD

<b>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</b>				7.674.975		15.000.000		30.850.000	PAD
	<b>Jumlah lembaga usaha ekonomi masyarakat desa yang dibina</b>	<b>lembaga</b>	5	7.674.975	5	15.000.000	5	30.850.000	PAD
<b>Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</b>				5.000.000		30.000.000		72.550.000	PAD
	<b>Jumlah fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna</b>	<b>Kali</b>	12	5.000.000	12	30.000.000	12	72.550.000	PAD

# BAB V

## PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinsospermasdes tahun 2022. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinsospermasdes sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinsospermasdes Perubahan 2022 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Perubahan 2022 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Dinsospermasdes dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Perubahan 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Dinsospermasdes menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Perubahan 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Perubahan 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

Purwokerto, Agustus 2022

Plt. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Banyumas



SUGENG AMIN, S.H., M.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670128 199302 2 001

